



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 57 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2022 NOMOR 57**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 57 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA DINAS**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**TAHUN 2023**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Strategi komunikasi global diperlukan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, karena Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah membawa bangsa Indonesia memasuki gerbang peradaban informasi, banyak perubahan mendasar dan membawa dampak yang luas di bidang politik, ekonomi dan sosial yang harus dihadapi dengan arif dan hati-hati. Adalah merupakan tantangan yang besar saat bangsa Indonesia berbenah diri dari keterpurukan untuk membangun Indonesia baru, pada saat itu pula harus memasuki era informasi.

Pemerintah Daerah Garut perlu bergerak cepat dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, atau sering disebut sebagai *E-Government*. Tantangan besar dalam implementasi *E-Government* terletak pada proses penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus focus pada wawasan strategis di masa depan. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Teknologi Informasi di Daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu **"Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"**,

DISKOMINFO Kabupaten Garut sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) DISKOMINFO Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra DISKOMINFO Tahun 2019-2024 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja DISKOMINFO Kabupaten Garut Tahun 2023 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DISKOMINFO Kabupaten Garut tahun 2023, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235

Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Renja DISKOMINFO Tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja DISKOMINFO Tahun 2023 adalah sebagai acuan DISKOMINFO dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi jangka menengah daerah Kabupaten Garut.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Substansi Renja DISKOMINFO Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II    Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu**

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD; Analisis

Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

**BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

**BAB V Penutup**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISKOMINFO Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISKOMINFO**

Renja DISKOMINFO merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis DISKOMINFO, pengukuran Tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan diantaranya dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DISKOMINFO yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Dokumen LAKIP DISKOMINFO Tahun 2022 pada sisi akuntabilitas keuangan, laporan realisasi APBD sampai dengan Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 5.418.118.861,- atau terealisasi 35,95 %- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 15.073.109.113,-

Dalam hal capaian kinerja sasaran program Tahun 2022 terhadap dokumen perencanaan yang ada yaitu Rencana Kerja DISKOMINFO Tahun 2022 dan Rencana Strategik DISKOMINFO Tahun 2019-2024 dapat diambil kesimpulan secara umum mengenai pencapaian sasaran program/kegiatan terhadap dokumen Renstra DISKOMINFO Tahun 2019 - 2024

menunjukkan kinerja sasaran yang baik (pencapaian target hingga 100 %).

Berdasarkan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan, sebanyak 0 % kuantitas output yang dihasilkan lebih besar dari realisasi targetnya dari suatu input yang sesuai dengan targetnya dan memiliki dampak (*outcomes*) yang sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan hanya sebesar 0 % dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan DISKOMINFO Kabupaten Garut mengindikasikan kuantitas *outcomes* yang tidak memenuhi target dengan input yang sesuai target. Selain itu, sebesar 0 % menunjukkan input yang tidak memenuhi target yang berimbas pada kuantitas output dan *outcomes* yang tidak semestinya. Dari hasil perhitungan analisis efisiensi dan efektivitas terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 diketahui bahwa dari - kegiatan yang dilaksanakan oleh DISKOMINFO - kegiatan memberikan indikasi efisien dan efektif sedangkan - kegiatan hanya memberikan indikasi efisien atau efektif saja.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 DISKOMINFO Kabupaten Garut selama Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 15.073.109.113,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.418.118.861,- atau 35,95%, Secara lengkap Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DISKOMINFO dan Pencapaian Renstra DISKOMINFO s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)\* dimuat dalam tabel 2.1.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DISKOMINFO sebagai berikut:

- a. Belum dipahaminya secara utuh tentang Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*) yang ingin dicapai, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- b. Kriteria penilaian pencapaian kinerja harus dirancang dalam konsep pemahaman yang mudah dipahami, spesifik, dapat diukur (kuantitatif), spesifik, tidak bias, namun tetap memberikan derajat kemampuan penilaian yang tinggi;
- c. Keterbatasan data elektronik yang diperlukan bagi komunikasi dan informasi publik ;
- d. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam Informasi Teknologi;
- e. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan teknologi yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja;
- f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi tersebut diantaranya melalui peningkatan kompetensi aparatur pada lingkungan internal DISKOMINFO, terutama dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang komunikasi dan informatika. Selain itu juga perlu dikembangkan strategi koordinasi yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi melalui dukungan eksternalitas organisasi.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DISKOMINFO dan**  
**Pencapaian Renstra DISKOMINFO s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)\***

Nama SKPD : DISKOMINFO

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan</b>								
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	168 HOK		42.450.000,00	42.350.000,00	99,76	49.740.000,00	22.545.000,00	45,33
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang		6.222.882.549,00	5.439.863.227,00	5.439.863.227,00	6.253.679.808,00	6.253.679.808,00	44,30
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Laporan	7 Dok		44.386.000,00	44.386.000,00	100%	72.153.300,00	72.153.300,00	28,88

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi Anggaran								
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	9 Orang Security		174.717.500,00	173.326.705,00	173.326.705,00	187.587.386,00	58.233.840,00	31,04
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah aparatur yang mengikuti Kursus, pelatihan, sosialisasi, Pendidikan PNS Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	74 Orang			-	-	-	-	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Peralatan Listrik	15 Jenis		172.800.000,00	171.409.205,00	99,20	11.838.600,00	8.815.500,00	74,46
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Jenis		179.332.200,00	179.332.200,00	94,79	-	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis		33.554.600,00	33.457.200,00	99,71	9.227.500,00	1.622.500,00	17,58
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Jenis ATK	30 Jenis		126.042.244,00	124.667.860,00	98,91	86.110.909,00	85.643.250,00	99,46

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kantor									
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	15 Jenis		40.151.900,00	40.084.400,00	99.83	59.542.000,00	29.326.800,00	49,25
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Harian	2 Jenis Mamin		30.177.000,00	28.590.000,00	94.74	64.995.000,00	9.141.000,00	14,06
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	350 HOK		47.055.200,00	47.045.000,00	99.98	62.682.150,00	32.970.000,00	52,60

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 Kendaraan		47.045.000,00	26.250.000,00	91.25	-	-	-
	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA			-	-	-		15.000.000,00	15.000.000,00	100

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, Telepon dan Air	3 Rekening		225.533.105,00	217.493.841,00	96.44	212.822.585,00	102.337.117,00	48,09
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Jenis		24.950.000,00	24.950.000,00	100	188.342.585,00	94.320.493,00	50,08
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Jasa Kebersihan	9 orang		18.000.000,00	18.000.000,00	100	176.969.900,00	45.203.072,00	25,54

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kantor	Kantor								
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				24.950.000,00					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	16 Unit		105.330.000,00	105.330.000,00	100	66.250.000,00	46.000.000,00	69,43

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Dinas Jabatan									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK Kendaraan	16 Unit		13.800.000,00	11.349.000,00	82,24	19.400.000,00	5.372.400,00	27,69
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		4 Gedung		348.310.500,00	347.087.500,00	99,65	-	-	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Lainnya									
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Prosentase ketersediaan Informasi Publik Pemerintah daerah</b>	100%							
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</b>									

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Kabupaten/Kota</b>									
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah konten komunikasi publik	240 vidio dan 14digital signage		250.000.000,00	240.390.700,00	96,16	175.195.000,00	76.610.000,00	43,73
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	prosentase informasi publik dideminasikan kepada masyarakat	114 Konten Penyiaran		100.000.000,00	96.541.454,00	96,54	32.984.400,00	1.400.000,00	4,24

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Daerah Jumlah Pameran Yang diikuti Jumlah SKPD yang memiliki Daftar Informasi Publik (PPID) dan daftar Informasi dikecualikan	100%		325.505.400,0 0	288.620.65 2,00	288.620.65 2,00	95.509.300,00	39.240.000,00	41,09

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Informasi yang disampaikan ke media Jumlah Kemitraan Media Masa dengan Pemkab Garut	100%		1.020.962.900,00	1.009.651.200,00	98,89	1.123.933.000,00	486.430.000,00	43,28
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Media	945 Rilis		239.968.400,00	210.124.100,00	87,56	100.330.000,00	97.289.500,00	96,97

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tradisional								
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kunjungan Media Masa Jumlah rilis Berita	84 Angka		294.764.700,0 0	254.897.28 3,00	86,47	135.900.000,00	10.870.000,00	8,00
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut</b>	1,63 Angka							

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	Jumlah Backup Redudansi ISP Jumlah Domain SKPD Jumlah Email	100%		50.000.000,00	49.865.000,00	49.865.000,00	-	-	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Jumlah IP Publik								
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemerintah daerah	100%		10.459.148.600,00	10.442.242.800,00	99,84	3.263.068.575,00	527.309.800,00	16,16

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi yang terintegrasi	100%		531.472.500,00	404.161.500,00	76,05	298.927.200,00	80.640.000,00	26,98

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK yang terkelola	100%		270.429.000,00	265.671.050,00	98,24	119.308.200,00	52.110.000,00	43,68
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah CCTV Monitoring Command Center Jumlah CMS Pemerintah Kabupaten Garut Jumlah	100%		1.702.084.999,00	1.690.854.780,00	99,34	817.697.025,00	461.382.000,00	56,42

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Command Center yang Terkelola Jumlah Dokumen Kajian SOP Pengelolaan Command Center Jumlah Website Pemkab yang Terkelola								

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Cetak Biru Smart City	100%		62.521.600,00	57.704.100,00	92,29	56.693.000,00	17.900.000,00	31,57
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Cakupan SDM Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	100%		100.000.000,00	100.000.000,00	93,48	53.660.000,00	0	0

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah lisensi aplikasi video conference Jumlah Unit Video Conference	100%		148.350.000,0 0	143.079.80 0,00	96,45	91.916.700,00	54.362.697,00	59,14
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Jumlah Dokumen Rencana Induk SPBE	100%		191.872.500,0 0	191.325.40 0,00	99,71	228.972.500,00	6.760.000,00	2,95

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>									
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase informasi pemerintah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi</b>	550 Angka							

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	prosentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada	100%		146.000.000,00	144.185.300,00	98,76	146.000.000,00	116.072.200,00	79,50

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kabupaten/Kota	level II								
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah DM sandiman yang bimtek	80%		88.000.000,00	86.182.400,00	97,93	192.000.000,00	9.468.850,00	4,93

NO	RANCANGAN AWAL RKP				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	sisten TTE yang telah memanfaatkan sertifikat elektronik SKPD	100%		242.000.000,00	241.799.800,00	99,92	242.000.000,00	10.035.000,00	4,15
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>									

NO	RANCANGAN AWAL RKP				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral</b>	100%							
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>									

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen statistik sektoral daerah dan aplikasi	1 DOk		236.500.000,00	234.675.800,00	99,23	130.000.000,00	20.019.900,00	15,40
	MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	-	-	-	-	-	-	83.000.000,00	3.051.800,00	3,68

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOMINFO s/d tahun berjalan 2022 (s.d bulan Juni 2022)	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-4)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL			-	-	-	-	52.000.000,00	19.959.900,00	38,38
	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR			-	-	-	-	130.302.075,00	125.387.800,00	96,23
	<b>JUMLAH</b>				24.180.137.097,00	23.054.746.250,00	95,35	15.073.109.113,00	5.418.118.861,00	35,95

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Penyelenggaraan pelayanan DISKOMINFO Kabupaten Garut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Urusan Komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 147 Tahun 2019 Kabupaten Garut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 235 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Pengelolaan urusan Pemerintahan dan tugas Pembantuan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DISKOMINFO adalah urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 C dan Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut, terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, 9 (Sembilan) Seksi, 1 (satu) UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

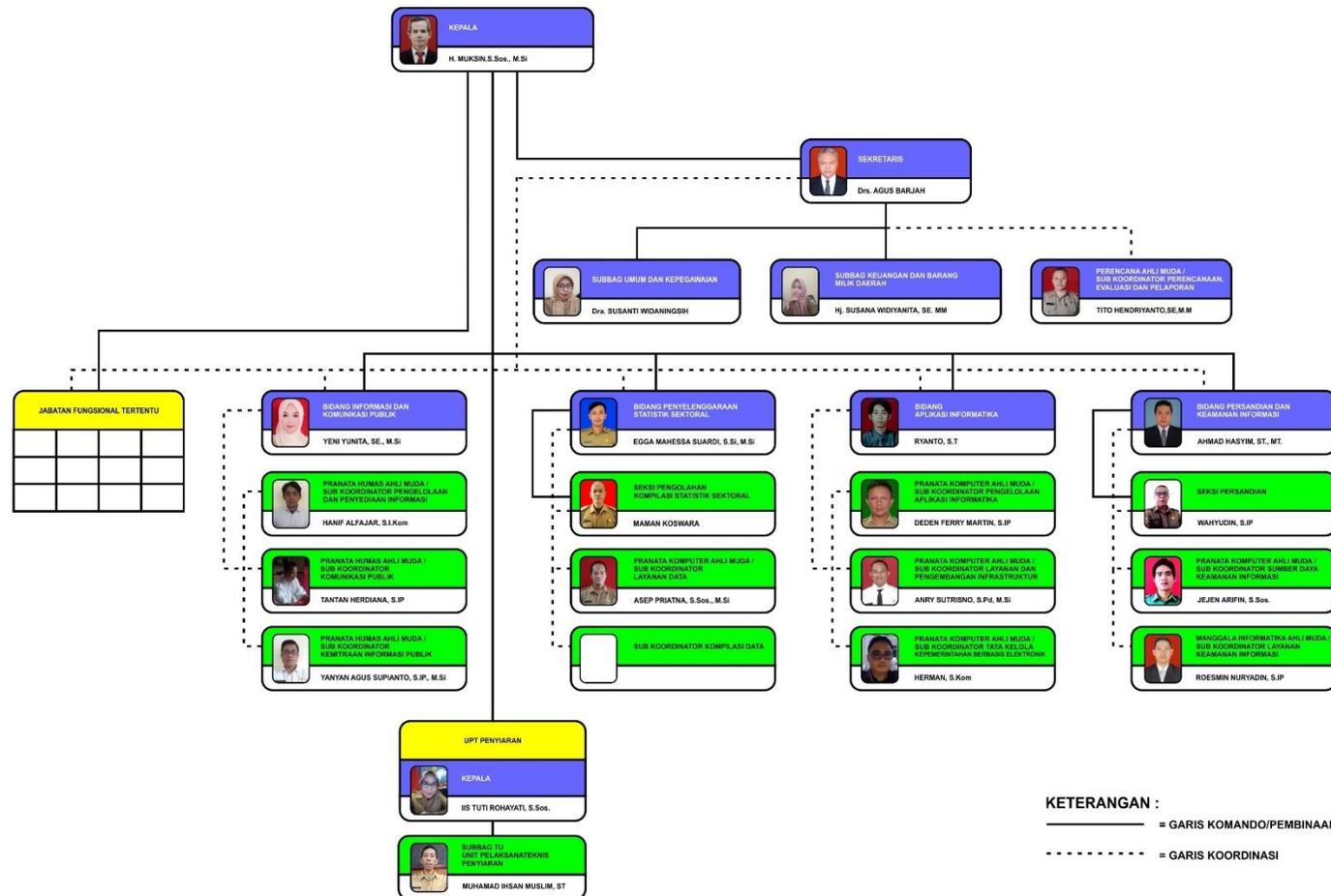
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  3. Kelompok Sub Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
  1. Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Informasi;
  2. Kelompok Sub-Substansi Komunikasi Publik; dan
  3. Kelompok Sub-Substansi Kemitraan Informasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:

1. Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Aplikasi Informatika;
  2. Kelompok Sub-Substansi Layanan dan Pengembangan Infrastruktur; dan
  3. Kelompok Sub-Substansi tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi membawahkan ;
1. Seksi Persandian;
  2. Kelompok Sub-Substansi Layanan Keamanan Informasi;
  3. Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Keamanan Informasi;
- f. Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1. Kepala Seksi Pengolahan Kompilasi Data Statistik Sektoral;
  2. Kelompok Sub-Substansi Kompilasi Data;
  3. Kelompok Sub-Substansi Layanan Data.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GARUT  
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 235 TAHUN 2021**



Keadaan Pegawai DISKOMINFO Garut berdasarkan jumlah :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1.	PNS	48	
2.	CPNS	-	
3.	Honorar	16	
Jumlah		64	

Pencapaian kinerja pelayanan DISKOMINFO Kabupaten Garut dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut 710/015/Diskominfo DISKOMINFO tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut dikaitkan dengan target dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DISKOMINFO**  
**Kabupaten Garut**

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Prosentase SKPD pemerintah yang terintegrasi layanan berbasis elektronik			Cakupan layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemerintah daerah	204	306	408	510	600	204	306	408	510	600	34%	51%	68%	85%	100

			Jumlah infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK yang terlayani	2 data center	3 data center	4 data center	5 data center	6 data center	2 data center	3 data center	4 data center	5 data center	6 data center	33 %	50 %	67 %	83 %	100 %
			prosentase ketersediaan Sumber Daya TIK Pemda	75 orang	150 orang	225 orang	300 orang	375 orang	75 orang	150 orang	225 orang	300 orang	375 orang	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
			prosentase wifi area publik terlayani	35	40	45	50	55	35	40	45	50	55	64 %	73 %	82 %	91 %	100

			cakupan pengembangan fungsionalitas website pemkab	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
			cakupan command center yang terkelola	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
			cakupan layanan smart city	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	20%	40%	60%	80%	100%	
			Jumlah regulasi yang ditetapkan	1 Ke bija kan	2 Ke bij akan	3 Ke bij akan	4 Ke bij akan	5 Ke bij akan	1 Ke bij akan	2 Ke bij akan	3 Ke bij akan	4 Ke bij akan	5 Ke bij akan	20%	40%	60%	80%	100%	

			jumlah SKPD yang terlayani aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	2 SK PD	4 SK PD	6 SK PD	8 SK PD	10 SK PD	2 SK PD	4 SK PD	6 SK PD	8 SK PD	10 SK PD	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
			cakupan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik kabupaten	42 kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %									

				jumlah subdo main SKPD yang terlayani	28 subdo main	49 subdo main	64 subdo main	79 subdo main	96 subdo main	28 subdo main	49 subdo main	64 subdo main	79 subdo main	96 subdo main	29 %	51 %	67 %	82 %	100 %
				cakupan layanan pengadaan secara elektronik	75 SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %									
				jumlah SKPD yang mempunyai perangkat lunak legal	15 SKPD	30 SKPD	45 SKPD	60 SKPD	75 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	45 SKPD	60 SKPD	75 SKPD	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
2	Prosentase informasi pemer			Jumlah Kebijakan tata kelola keama	1 dokumen		2 dokumen		3 dokumen	1 dokumen		2 dokumen		3 dokumen	33 %		67 %		100 %

ntah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi		nan informasi	n		n		n	n		n		n						
		prosentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada level II	15 SK PD	30 SK PD	45 SK PD	60 SK PD	75 SK PD	15 SK PD	30 SK PD	45 SK PD	60 SK PD	75 SK PD	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	
		prosentase Perangkat daerah yang pegawainya	15 SK PD	30 SK PD	45 SK PD	60 SK PD	75 SK PD	15 SK PD	30 SK PD	45 SK PD	60 SK PD	75 SK PD	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	

			memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi kategori "BAIK"																
			Jumlah aparatur pemerintah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi	30 orang	60 orang	90 orang	120 orang	150 orang	30 orang	60 orang	90 orang	120 orang	150 orang	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	

				prosent ase sistem elektro nik yang telah dilakuk an penguji an kerenta nan dan penilaian resiko dan prosent ase sistem elektro nik yang telah meman faatkan sertifik at elektro nik	15 sist em ele ktr oni k	30 sist em ele ktr oni k	45 sist em ele ktr oni k	60 sist em ele ktr oni k	75 sist em ele ktr oni k	15 sist em ele ktr oni k	30 sist em ele ktr oni k	45 sist em ele ktr oni k	60 sist em ele ktr oni k	75 sist em ele ktr oni k	20 %	40 %	60 %	80 %	10 0%
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	----------

			Jumlah infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau fasilitas teknologi keamanan informasi	15 unit	30 unit	45 unit	60 unit	75 unit	15 unit	30 unit	45 unit	60 unit	75 unit	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
			Prosentase keterhubungan perangkat daerah dalam jaringan komunikasi sandi	15 SK PD	30 SK PD	45 SK PD	60 SK PD	75 SK PD	15 SK PD	30 SK PD	45 SK PD	60 SK PD	75 SK PD	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

				jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	10 koordinasi	20 koordinasi	30 koordinasi	40 koordinasi	50 koordinasi	10 koordinasi	20 koordinasi	30 koordinasi	40 koordinasi	50 koordinasi	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
				Jumlah perangkat daerah yang menjadi entitas audit	33 SK PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %									
3	Prosentase ketersediaan layanan informasi dan komunikasi publik			jumlah SKPD yang memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi	79 SK PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %									

			Dikecu alikan (DIK)															
			jumlah data dan informa si penyele nggara an pemer intahan, pemba ngunan daerah dan kemasy arakata n	20 00 ma jala h	40 00 ma jal ah	60 00 ma jal ah	80 00 ma jal ah	10 00 0 ma jal ah	20 00 ma jal ah	40 00 ma jal ah	60 00 ma jal ah	80 00 ma jal ah	10 00 0 ma jal ah	20 %	40 %	60 %	80 %	10 0%
			jumlah informa si yang disamp aikan ke	32 70 ber ita	65 40 ber ita	98 10 ber ita	13 08 0 ber ita	16 35 0 ber ita	32 70 ber ita	65 40 ber ita	98 10 ber ita	13 08 0 ber ita	16 35 0 ber ita	20 %	40 %	60 %	80 %	10 0%

			media															
			Prosentase kemitraan media massa dengan Pemkab Garut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			prosentase jumlah sengketa informasi yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase pengelolaan aduan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)	18 kelompok	36 kelompok	52 kelompok	68 kelompok	84 kelompok	18 kelompok	36 kelompok	52 kelompok	68 kelompok	84 kelompok	21%	43%	62%	81%	100%
			jumlah konten komunikasi publik	48 video	96 video	144 video	192 video	240 video	48 video	96 video	144 video	192 video	240 video	20%	40%	60%	80%	100%
			Jumlah Kunjungan ke media massa	1 kunjungan	2 kunjungan	3 kunjungan	5 kunjungan	6 kunjungan	1 kunjungan	2 kunjungan	3 kunjungan	5 kunjungan	6 kunjungan	17%	33%	50%	83%	100%
			Jumlah rilis berita	900 ber	1800 ber	2700 ber	3600 ber	4500 ber	900 ber	1800 ber	2700 ber	3600 ber	4500 ber	20%	40%	60%	80%	100%

					ita														
				Jumlah Videotron		1 unit	1 unit	2 unit	2 unit		1 unit	1 unit	2 unit	2 unit		50 %	50 %	50 %	50 %
4	Prosentase data statistik sektoral yang terpublikasikan			jumlah dokumen statistik sektoral daerah	33 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%									
				prosentase data statistik sektoral yang tersedia	15 data statistik sektoral	30 data statistik sektoral	45 data statistik sektoral	60 data statistik sektoral	75 data statistik sektoral	15 data statistik sektoral	30 data statistik sektoral	45 data statistik sektoral	60 data statistik sektoral	75 data statistik sektoral	20%	40%	60%	80%	100%
				prosentase penyebaran informasi data	15 data statistik sektoral	30 data statistik sektoral	45 data statistik sektoral	60 data statistik sektoral	75 data statistik sektoral	15 data statistik sektoral	30 data statistik sektoral	45 data statistik sektoral	60 data statistik sektoral	75 data statistik sektoral	20%	40%	60%	80%	100%

			statistik sektoral	tor al yang dis eba rlu ask an	tor al yang dis eba rlu ask an	tor al yang dis eba rlu ask an	tor al yang dis eba rlu ask an	tor al yang dis eba rlu ask an	tor al yang dis eba rlu ask an	tor al yang dis eba rlu ask an	tor al yang dis eba rlu ask an	tor al yang dis eba rlu ask an	tor al yang dis eba rlu ask an					
			Jumlah aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi bidang statistik	30 orang	60 orang	90 orang	120 orang	150 orang	30 orang	60 orang	90 orang	120 orang	150 orang	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
			Jumlah koordinasi statistik sektoral	10 koordinasi	20 koordinasi	30 koordinasi	40 koordinasi	50 koordinasi	10 koordinasi	20 koordinasi	30 koordinasi	40 koordinasi	50 koordinasi	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

5	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran		Jumlah Pembayaran Rekening Listrik dan Kawat	3 rekening	100%	100%	100%	100%	100%										
			Jumlah STNK kendaraan	14 unit	20 unit	24 unit	26 unit	28 unit	14 unit	20 unit	24 unit	26 unit	28 unit	50%	71%	86%	93%	100%	
			Jumlah Peralatan Kebersihan	20 paket	20 paket	100%	100%	100%	100%	100%									
			Jumlah n Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4 jenis	4 jenis	100%	100%	100%	100%	100%									
			Jumlah jenis ATK	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%									

			Jumlah Jenis barang cetakan	20 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	20 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	91 %	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%
			Jumlah komponen peralatan listrik	20 item	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%									
			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	12 unit	14 unit	16 unit	18 unit	10 unit	12 unit	14 unit	16 unit	18 unit	55 %	67 %	78 %	89 %	10 0%
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15 jenis	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%									
			Jumlah makanan dan minuman harian pegawai i dan	14 50 s/porsi	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%									

			makan an rapat															
			Jumlah Perjala nan Dinas Luar Daerah	16 8 HO K	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%									
			Jumlah Perjala nan Dinas Dalam Daerah	27 6 HO K	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%									
			Jumlah Perjala nan Dinas ke luar negeri	6 HO K	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%									
			Jumlah Jasa Keama nan Kantor	5 OR AN G	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%									

				Jumlah Pegawai Non PNS (TKK dan TKS)	16 Orang	100%	100%	100%	100%	100%										
6	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Dinas Kominfo			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	14 item	16 item	18 item	22 item	26 item	14 item	16 item	18 item	22 item	26 item	54%	61%	69%	85%	100%	
				DED Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	1 lokasi										100%					
				Jumlah kendaraan roda Dua		2 unit	4 unit	6 unit	8 unit		2 unit	4 unit	6 unit	8 unit		25%	50%	75%		100%
				Jumlah kendar				2 unit	4 unit				2 unit	4 unit				50%		100%

				aan roda empat				t	t				t	t					
				Unit			1 uni t									10 0%			
				Gedung kantor yang direhab ilitasi/ dipelih ara	4 lok asi	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%									
7	Prosent ase keterse diaan dokum en perenca naan Dinas Komuni kasi dan Informa tika yang akunta			Jumlah Dokum en Perenca naan yang tersusu n	7 do ku me n	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%									
				Lapora n Progno sis Realisa si Anggar an`	1 do ku me n	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%									

	bel			Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja	7 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%									
8	Prosentase sumber daya aparatur yang terlati			Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal	71 orang	100%	100%	100%	100%	100%									
				jumlah aparatur yang mengikuti Kursus , pelatihan, sosialisasi, Pendidikan PNS	55 orang	100%	100%	100%	100%	100%									



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISKOMINFO**

Pelaksanaan peran DISKOMINFO sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

- a. Pemanfaatan teknologi informatika (*e-gov*) dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal;
- b. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal;
- c. Belum optimalnya informasi yang tersedia terkait kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang layanan informasi dan komunikasi secara elektronik maupun teknologi yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DISKOMINFO dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

- a) Perbaiki berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah

pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi

- b) Peningkatan peranan pos dan telekomunikasi serta media massa melalui pemberdayaan sehingga terjalinnya kerjasama dan keterpaduan langkah dalam penyediaan informasi
- c) Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan
- d) Perbaikan sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebarannya melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis informasi (e-government).

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 disusun dengan tema ***“Penguatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”*** Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok Diskominfo Kabupaten Garut dalam pengelolaan Komunikasi dan Informasi serta tugas lain bidang Pemerintahan telah disusun rencana program kegiatan tahun 2023 yang terdiri dari 5 program, 14 kegiatan, 51 Sub Kegiatan.

Rencana program dan kegiatan DISKOMINFO yang terdapat pada RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada table :

## 2.3 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2023

### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GARUT

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	<b>10.367.161.003</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	<b>10.367.161.003</b>	
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Capaian Kinerja serta	100 %	<b>264.999.700</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Capaian Kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	<b>264.999.700</b>	

			evaluasi kinerja perangkat daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	74.999.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	74.999.700	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	65.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	25.000.000	

1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100 %	<b>6.678.537.918</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100 %	<b>6.678.537.918</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6,598,599,918	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6,598,599,918	
2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	79.938.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	79.938.000	
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah - SKPD Kantor	100 %	<b>296.155.818</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah - SKPD Kantor	100 %	<b>296.155.818</b>	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	100%	296.155.818	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	100%	296.155.818	

1.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			100%	<b>156.884.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			100%	<b>156.884.000</b>	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut	jumlah aparatur yang mengikuti Kursus, pelatihan, sosialisasi, Pendidikan PNS Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	74 Orang	156.884.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut	jumlah aparatur yang mengikuti Kursus, pelatihan, sosialisasi, Pendidikan PNS Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	74 Orang	156.884.000	
1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, cetakan dan penggandaan serta laporan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraa	100 %	<b>512.926.667</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, cetakan dan penggandaan serta laporan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rakor/konsultasi dan dokumen penatausahaan arsip dinamis	100 %	<b>512.926.667</b>	

			n rakor/konsultasi dan dokumen penatausahaan arsip dinamis								
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.550.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.550.600	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.149.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.149.500	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Garut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.673.067	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Garut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.673.067	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	51.094.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	51.094.000	
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Garut	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	64.984.600	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Garut	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	64.984.600	

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	134.475.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	134.475.000
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	74.999.900	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	74.999.900
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/lapangan, peralatan dan mesin lainnya	100 %	<b>1.056.819.300</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/lapangan, peralatan dan mesin lainnya	100 %	<b>1.056.819.300</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	810.424.500	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	810.424.500
2	Pengadaan Mebel	Kab. Garut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	94.310.800	Pengadaan Mebel	Kab. Garut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	94.310.800

3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	152.084.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	152.084.000	
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	<b>583.677.600</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	<b>583.677.600</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	261.234.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	261.234.800	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34.820.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34.820.000	

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	287.622.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	287.622.800
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak/perizinannya serta sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	<b>817.160.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak/perizinannya serta sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	<b>817.160.000</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	93.170.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	93.170.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kab. Garut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	16 Unit	24.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kab. Garut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	24.250.000

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	699.740.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	699.740.000	
2	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Kab. Garut	Prosentase Komunikasi publik yang dideminasikan kepada masyarakat	82,00 %	<b>3.217.044.400</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Kab. Garut	Prosentase Komunikasi publik yang dideminasikan kepada masyarakat	82,00 %	<b>3.217.044.400</b>	
2.1	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a</b>	Kab. Garut	Jumlah Disain Signage Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan Metra Jumlah Konten Penyiaran Jumlah Langganan Media Massa Jumlah Rilis Vidio Prosentase Sengketa Informasi dan Pengaduan yang	6 digitalsig 84 kelompok 98 konten penyiaran 84 angka 930 rilis 192 vidio 100 % 82 %	<b>3,217,044,400</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a</b>	Kab. Garut	Jumlah Disain Signage Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan Metra Jumlah Konten Penyiaran Jumlah Langganan Media Massa Jumlah Rilis Jumlah Vidio Prosentase Sengketa Informasi dan Pengaduan yang Terselesaikan Tersebarluaskannya informasi dan Komunikasi kepada masyarakat Pemerintah	6 digitalsig 84 kelompok 98 konten penyiaran 84 angka 930 rilis 192 vidio 100 % 82 %	<b>3,217,044,400</b>	

			Tersebarluaskannya informasi dan Komunikasi kepada masyarakat Pemerintah Kab. Garut					Kab. Garut			
1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	600,000,000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	600,000,000	
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	232.316.400	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	232.316.400	
3	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	324.855.200	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	324.855.200	
4	Layanan Hubungan Media	Kab. Garut	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	1.443.770.000	Layanan Hubungan Media	Kab. Garut	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	1.443.770.000	

5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Garut	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	9 Orang	303.370.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Garut	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	9 Orang	303.370.000
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	312.732.800	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	312.732.800
3	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Kab. Garut	Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut	1,22 Poin	<b>6.575.255.100</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Kab. Garut	Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut	1,22 Poin	<b>6.575.255.100</b>
3.1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	<b>3.445.280.000</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	<b>3.445.280.000</b>

1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	51.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	51.000.000	
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Garut	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	3.394.280.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Garut	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	3.394.280.000	
4	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Garut	Jumlah Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	1 Dok	<b>3.129.975.100</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Garut	Jumlah Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	<b>3.129.975.100</b>	

	<b>a</b>		Kabupaten/Kota			<b>a</b>					
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	298.927.200	Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	298.927.200	
2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	1.607.570.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	1.607.570.000	
3	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Garut	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Layanan	813.912.800	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Garut	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Layanan	813.912.800	

4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	44,870,000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	44,870,000	
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	90,624,300	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	90,624,300	
6	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	89,206,000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	89,206,000	
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	184,864,800	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	184,864,800	

	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Kab. Garut	Indeks keamanan informasi (INDEKS KAMI)	450 Poin	<b>646.917.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Kab. Garut	Indeks keamanan informasi (INDEKS KAMI)	450 Poin	<b>646.917.000</b>	
5.1	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Garut	Prosentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Keamanan Informasi	50 %	<b>596.917.000</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Garut	Prosentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Keamanan Informasi	50 %	<b>596.917.000</b>	
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Dokumen		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Dokumen		

2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	147.445.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	147.445.000
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Garut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Garut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	50.000.000
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	96 Perangkat	276.800.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	96 Perangkat	276.800.000
5.2	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat</b>	Kab. Garut	Tersedianya Perangkat Jaringan Komunikasi Sandi yang	50 %	<b>50.000.000</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat</b>	Kab. Garut	Tersedianya Perangkat Jaringan Komunikasi Sandi yang Menghubungkan Entitas dan Perangkat Daerah	50 %	<b>50.000.000</b>

	<b>Daerah Kabupaten/Kot a</b>		Menghubungk an Entitas dan Perangkat Daerah			<b>Daerah Kabupaten/Kot a</b>					
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	96 Perangk Daerah	50.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	96 Perangk Daerah	50.000.000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG STATISTIK</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG STATISTIK</b>					
6	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAA N STATISTIK SEKTORAL</b>	Kab. Garut	PROGRAM PENYELENGG ARAAN STATISTIK SEKTORAL	87 %	<b>1,127,987,200</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAA N STATISTIK SEKTORAL</b>	Kab. Garut	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	87 %	<b>1,127,987,200</b>	
6.1	<b>Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a</b>		jumlah Dokumen Statistik Sektoral	1 Dokumen	<b>1,127,987,200</b>	<b>Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a</b>		jumlah Dokumen Statistik Sektoral	1 Dokume n	<b>1,127,987,200</b>	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	1 Dokumen	145,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	1 Dokume n	145,000,000	

	dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Garut	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	255,084,200	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Garut	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	255,084,200	
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	1 orang	200,190,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	1 orang	200,190,000	
4	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Garut	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 unit	527,713,000	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Garut	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 unit	527,713,000	
	<b>JUMLAH</b>				<b>21.934.364.703,-</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>21.934.364.703,-</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DISKOMINFO melakukan penelaahan dan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun Kementerian/Lembaga.

**Tabel 2.5**  
**Rumusan Usulan Program/Kegiatan**  
**Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi**  
**Provinsi/Kabupaten/kota**

<b>No.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Volume</b>	<b>Lokasi</b>	<b>SKPD Terkait</b>	<b>Validasi / Keterangan</b>
I.	<b>Program Pengembangan Jaringan Infrastrukur Daerah</b>					
-	-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu *Techno Economy*, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Garut berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD**

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DISKOMINFO yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra DISKOMINFO, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari setiap misi ditetapkan tujuan dan sasaran Renja DISKOMINFO Tahun 2023.

Adapun tujuan dan sasaran dari ke-4 (empat) misi DISKOMINFO Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Misi** : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD);

**Tujuan :**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik /SPBE

**Sasaran :**

1. Terselenggaranya Pemerintah Berbasis elektronik;
2. Cakupan Penyebarluasan informasi dan komunikasi di Kabupaten Garut.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan DISKOMINFO tahun 2023 merupakan pelaksanaan operasional tahun ketiga dari Renstra DISKOMINFO tahun 2019-2024 dan disusun dengan mengacup ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023, berdasarkan Renstra DISKOMINFO tahun 2019-2024, program dan kegiatan indikatif DISKOMINFO pada tahun 2023 dijabarkan menurut 1 (satu) misi DISKOMINFO, dimana setiap misi dijabarkan

melalui kebijakan dan program, Secara lebih rinci rumusan rencana Program dan Kegiatan DISKOMINFO Kabupaten Garut Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dituangkan dalam Tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

Nama SKPD : DISKOMINFO

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>20.159.460.503</b>					<b>36.821.791.854</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	<b>10.367.161.003</b>				95 %	<b>11.602.417.354</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Capaian Kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	<b>264.999.700</b>				100 %	<b>331.500.000</b>	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	74.999.700	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Dokume	85,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Dokume	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Dokume	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Dokume	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Dokume	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	65.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Laporan	71.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	25.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	3 Laporan	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100 %	<b>6.678.537.918</b>				100 %	<b>7.346.392.150</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/B	6,598,599,918	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	68 Orang/B	7,258,459,910	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 Dok	79.938.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	7 Dok	87.932.240	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah - SKPD Kantor	100 %	<b>296.155.818</b>				100 %	<b>302.464.250</b>	

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kantor	1 Dokumen	296.155.818	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Dokume	302,464,250	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100 %	<b>156.884.000</b>				100 %	<b>176.000.000</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang	156.884.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	74 Orang	176.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, cetakan dan penggandaan serta laporan fasilitas kunjungan tamu, penyelenggaraan rakor/konsultasi dan dokumen penatausahaan arsip dinamis	100 %	<b>512.926.667</b>				100 %	<b>604.210.230</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.550.600	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Paket	13.200.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.149.500	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Paket	43.487.730	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.673.067	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Paket	185.900.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	51.094.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Paket	57.200.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	64.984.600	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Laporan	71.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	134.475.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Laporan	147.922.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	74.999.900	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Dokume	85,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/lapangan, peralatan dan mesin lainnya	100 %	<b>1.056.819.300</b>				100 %	<b>1.339.442.620</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	810.424.500	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Unit	951.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	94.310.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Unit	120.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	152.084.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		14 Unit	267.942.620	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	<b>583.677.600</b>				100 %	<b>601.908.104</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	261.234.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 Laporan	287.363.104	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34.820.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	39.545.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	287.622.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	275.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak/perizinannya serta sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	<b>817.160.000</b>				100 %	<b>900.500.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	93.170.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		16 Unit	97.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	24.250.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		16 Unit	33.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	699.740.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 Unit	770.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Prosentase Komunikasi publik yang dideminasikan kepada masyarakat	82,00 %	<b>3.217.044.400</b>				82,00 %	<b>4.346.302.500</b>	

<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Disain Signage Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan Metra Jumlah Konten Penyiaran Jumlah Langganan Media Massa Jumlah Rilis Jumlah Vidio Prosentase Sengketa Informasi dan Pengaduan yang terselesaikan Tersebarluaskannya informasi dan Komunikasi kepada masyarakat Pemerintah Kab. Garut	6 digitalsig 84 kelompok 98 konten penyiaran 84 angka 930 rilis 192 vidio 100 % 82 %	<b>3,217,044,400</b>				6 digitalsig 84 kelomp 98 konten penyiaran 84 angka 930 rilis 192 vidio 100 % 82 %	<b>4,346,302,500</b>	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	600,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	1 Dokume	660,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	232.316.400	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	1 Dokume	396,302,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	324.855.200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	1 Dokume	375,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	1.443.770.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	1 Layanan	1.870.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	9 Orang	303.370.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	9 Orang	440.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	312.732.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	1 Dokume	605.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut	1,22 Poin	<b>6.575.255.100</b>				1,22 Poin	<b>20.873.072.000</b>	
<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	<b>3.445.280.000</b>				1 Dok	<b>16.016.000.000</b>	

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen 1 Dokumen	51.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0 Dokume 1 Dokume	66,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	3.394.280.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Unit	15.950.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	<b>3.129.975.100</b>				1 Dok	<b>4.857.072.000</b>	
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	298.927.200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokume	714,967,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	1.607.570.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 unit	1.870.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Layanan	813.912.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 Layanan	1.600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	44,870,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	137,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	90,624,300	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	165,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	89,206,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	132,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	184,864,800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	237,605,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			<b>1,127,987,200</b>					<b>36.821.791.854</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	87 %	<b>1,127,987,200</b>				87 %	<b>1,457,500,000</b>	
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	jumlah Dokumen Statistik Sektoral	1 Dokumen	<b>1,127,987,200</b>				100 %	<b>331.500.000</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	145,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Dokume	85,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	255,084,200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Dokume	302,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	1 orang	200,190,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Dokume	302,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 unit	527,713,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 unit	605,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			<b>646.917.000</b>				<b>1,241,926,300</b>		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Indeks keamanan informasi (INDEKS KAMI)	450 Poin	<b>646.917.000</b>				450 Poin	<b>1,241,926,300</b>	
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Keamanan Informasi	50 %	<b>596.917.000</b>				50 %	<b>1,126,926,300</b>	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Dokumen	122.672.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	4 Dokumen	261,926,300	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	147.445.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Laporan	175,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	50.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	1 Laporan	115,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	96 Perangk	276.800.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	96 Perangk	575,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Perangkat Jaring Komunikasi Sandi yang Menghubungkan Entitas dan Perangkat Daerah	50 %	<b>50.000.000</b>	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	50 %	115,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	96 Perangkat Daerah	50.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut	96 Perangkat Daerah	115,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>TOTAL</b>			<b>21.934.364.703</b>					<b>39.521.218.154</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan tahun dari Renstra Diskominfo Tahun 2019-2024. Selain menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023 yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah, Renja Diskominfo berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Diskominfo Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Renja Diskominfo Kabupaten Garut tahun 2023 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Diskominfo Kabupaten Garut sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang

sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mewujudkan *Good Governance*.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Diskominfo Kabupaten Garut Tahun 2023 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Diskominfo. Diharapkan semua elemen kelembagaan Diskominfo dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**